

Power Marine Stewardship Council (MSC) dalam Mewujudkan Program Sea Lion Exclusion Devices (SLED) di Australia Tahun 2007-2012

I Putu Gili Bestar Chandra Putra⁽¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi⁽²⁾, Putu Titah Kawitri Resen⁽³⁾
^(1, 2, 3)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: ptgilibestar@gmail.com⁽¹⁾, ratihkumaladewi@unud.ac.id⁽²⁾, kawitriresen@gmail.com⁽³⁾

ABSTRACT

The bycatch of marine biota species, especially the Sea Lion that interacts with the Fishing Industry, has become an transnational issue. Australia with endemic sea lion species that often interacts with lobster fisheries, trying to minimize or stop the impact. That why Australia needs help from various elements to implement it. MSC was invited to discuss and certify mitigation efforts for the Australian Sea Lion and Australian Fisheries Industry certification. The locus of this research is 2007-2012. This research uses the concept of Power of NGOs and Three Faces of Power theory. The results of the study illustrate that in this case, there is a power source owned by MSC so that can be invited by Australia to discuss this bycatch issue. The source of power is information that has been previously owned and strengthened by information from the epistemic community that affects the policy making process.

Keywords : *Marine Stewardship Council, Bycatch, Power of NGO, Three Faces of Power*

1. PENDAHULUAN

Fenomena *bycatch* sempat menimpa Singa Laut Australia dipesisir pantai Australia Barat. Singa Laut Australia adalah salah satu spesies singa laut paling langka di dunia dan hanya ditemukan di Australia Barat dan Australia Selatan (*Australia's Coral Coast*, 2018). Total populasi spesies ini hanya sekitar 10.000 hingga 12.000 ekor, yang menjadikan singa laut Australia salah satu spesies singa laut paling langka di dunia (*Government of Western Australia*, 2017), sehingga penting tindakan mitigasi demi melindungi spesies ini oleh pemerintah Australia.

Dahulu populasi singa laut menurun secara signifikan karena perburuan, meskipun sebagian besar populasi telah bereproduksi, namun masih berada ditingkat yang rendah (*Department of the Environment and Energy*, 2019). Dewasa ini,

ancaman terhadap singa laut di perairan Australia adalah interaksi dengan operasi penangkapan ikan komersial dan paparan terhadap puing-puing laut yang berbahaya yang melibatkan *West Coast Rock Lobster Fishery* (WRCLF). Area penangkapan WRCLF yang berada di pesisir barat Australia Barat diantara Shark Bay dan Cape Leeuwin (*Department of Primary Industries and Regional Development*, 2019), menyebabkan singa laut yang sedang berburu makanan utamanya, yaitu lobster pun tertangkap. Total kematian singa laut yang berinteraksi dengan nelayan-nelayan WRCLF diperkirakan 19 ekor selama musim penangkapan ikan tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2003/04 (Campbell, 2005).

Tindakan yang dilakukan pemerintah Australia guna merespon isu *bycatch* yang terjadi pada singa laut dengan undang-undang

Environment Protection and Biodiversity Conservation (UU EPBC) tidak cukup mencegah terjadinya *bycatch*. Hal tersebut disebabkan karena di mana pun ada proses pemancingan akan selalu terjadi *bycatch* (*World Wildlife Fund*, 2006), serta keterbatasan Australia akan informasi terkait *bycatch*. Sehingga Australia meminta bantuan dari aktor bukan negara yang menggunakan pendekatan berbeda. Partisipasi dari seluruh aktor yang memiliki perhatian pada sektor perikanan untuk mengatasi masalah ini, salah satu aktor yang berperan adalah *non-governmental organizations* (NGO).

Salah satu NGO yang menyadari pentingnya menghentikan *bycatch* serta memiliki kapabilitas untuk merangkul komunitas sekitar ialah *Marine Stewardship Council* (MSC) dengan memanfaatkan *power* pasar untuk mendorong perikanan menuju pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Dampak penangkapan komersial yang tidak tertangani memunculkan urgensi yang perlu diselidiki dan menghasilkan sebuah kebijakan guna mencegah isu ini. Perwujudan langkah dari Pemerintah Australia mengundang MSC dalam penyusunan dan pelaksanaan uji coba terhadap *Sea Lion Exclusion Devices* (SLED) untuk meminimalisir interaksi antara WCRLF dan Singa Laut Australia. SLED merupakan alat yang dipasang pada bibir pots, gunanya untuk mencegah singa laut dapat masuk kedalam pots dan terjebak. Uji percobaan terhadap SLED dilaksanakan pada musim pancing 2003/2004. Hasilnya, sejumlah nelayan melaporkan jumlah tertangkapnya singa laut didalam pots mulai berkurang. Penggunaan wajib SLED di WCRLF diimplementasikan untuk musim 2006/2007

seputar wilayah *Mid-West* Australia, di perairan dengan kedalaman kurang dari 20 meter. Serangkaian uji coba selesai dilakukan, pemerintah Australia mewajibkan seluruh nelayan komersial dan rekreasi *rock lobsters* untuk memiliki SLED untuk semua pot mereka di zona SLED dari musim pemancingan 2011/12 hingga seterusnya. Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk melihat *power* MSC dalam mewujudkan program SLED di Australia tahun 2007-2012.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang terjadi diatas, maka penelitian ini kemudian mempertanyakan “Bagaimana *power* MSC dalam mengatasi isu *bycatch* di Australia Tahun 2007-2012.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *power* *Marine Stewardship Council* (MSC) dalam mengatasi isu *bycatch* di Australia Tahun 2007-2012.

2. KAJIAN PUSTAKA

Power of NGO

Jenis sumber dari *power* sebuah NGO dapat berasal dari informasi, atau *epistemic community*, ataupun perpaduan diantara keduanya. Kedua sumber *power* ini bagi NGO merupakan langkah penting dalam menempatkan masyarakat dalam proses pengambilan dan kontrol sebuah keputusan. Kemampuan menempatkan individu dalam kontrol terhadap sosial, politik, ekonomi melalui akses ke informasi dan pengetahuan dapat

mempengaruhi proses dan hasil dari pengambilan keputusan pada sebuah isu.

Menurut Finnemore, et.al (1998) menyatakan terdapat tiga tahap yang dilalui untuk menghasilkan norma baru. Pertama, NGO dapat menjadi aktor yang tertarik dalam mengubah norma sosial untuk mengangkat isu penting. Kedua, NGO juga dapat membujuk masyarakat untuk menerima norma baru. Ketiga, setelah publik menginternalisasi norma baru, pemerintah harus mengakui bahwa norma baru ada di antara warganya. Ketika norma tersebut telah tertanam secara sosial dalam kehidupan aktor yang beridentitas sosial dan minatnya mendorong aktor tersebut untuk mengenali sebagai sumber *power*, maka disanalah otoritas moral memperoleh kegunaan sebagai sumber *power* (Hall, 1997). Konsep digunakan bukan untuk menguraikan tahapan yang dilakukan sebuah NGO, namun membantu peneliti untuk mengidentifikasi ketika sebuah norma baru atau nilai baru telah terbentuk maka disanalah bukti bahwa NGO memiliki *power*. Sumber *power* yang dimaksud adalah informasi dan/atau *epistemic community*.

Konsep ini membantu peneliti dalam menjelaskan MSC adalah NGO yang mampu dapat bertindak pada setiap tingkatan, baik dalam tingkat regional maupun internasional, serta bersifat *non-profit*. MSC dengan tujuan untuk mempromosikan perikanan yang berkelanjutan dan layak secara ekonomi, sembari mempertahankan keanekaragaman hayati, mempertahankan produktivitas, dan menjaga proses ekologis dari lingkungan laut. Merupakan simbol masyarakat internasional yang berusaha melakukan sebuah perubahan.

Sehingga untuk mencapai hal tersebut, MSC memberikan edukasi serta membagikan informasi kepada masyarakat, sembari memantau partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan tujuan sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, MSC dapat dikatakan memiliki kapabilitas atau telah melakukan pembingkai, penetapan agenda, pembelajaran sosial, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, hingga pada setiap tingkatan dapat mematuhi ataupun melaksanakan kebijakan yang sudah ada. Konsep ini membantu peneliti menjabarkan sumber *power* yang dimiliki MSC. Melalui informasi didalam produk yang dipasarkan guna mewujudkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan berguna sebagai alat penekan untuk pemerintah demi melakukan upaya mitigasi terhadap isu-isu lingkungan khususnya *bycatch* yang terjadi saat ini.

Three Faces of Power

Power adalah kapasitas aktor lain untuk menggunakan kehendaknya atas aktor lain. Kondisi ini merupakan kemampuan yang dimiliki aktor, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Aktor yang memiliki *power* berusaha memengaruhi pikiran, sikap, perilaku aktor lainnya. Dengan kata lain, *power* dapat terjadi ketika aktor tertentu membuat aktor lainnya menginginkan apa yang diinginkannya (Nye, 1990). Lukes (2005) membantu mendeskripsikan *power* dalam pengambilan kebijakan publik menjadi tiga wajah/dimensi *power* yakni, dimensi pertama, pembuat kebijakan. Dimensi kedua, pengaturan agenda. Dimensi ketiga, memanipulasi pandangan dari aktor lain. Dalam penelitian ini akan berfokus

pada ketiga dimensi *power* dari Stevens Lukes (2005). Dimensi pertama *power* adalah konflik terbuka yang hadir dalam pembuatan kebijakan. Konflik terbuka terbatas pada pengaruh yang dapat diamati. Sehingga kepentingan para aktor mulai terlihat pada pilihan kebijakan yang diambil dalam proses pembuatan kebijakan (Lorenzi, 2006).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah searah dengan rumusan masalah penelitian. Dengan demikian penelitian ini akan memaparkan sumber *power* MSC sehingga diundang Australia untuk mewujudkan program SLED. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat melalui jurnal ilmiah, buku-buku, makalah, *website*, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

MSC sebagai NGO pengelola manajemen perikanan berkelanjutan

Permasalahan pada sektor perikanan baik itu jumlah stok yang semakin menipis, dibuangnya kelaut alat-alat pemancingan, polusi, serta *bycatch* telah menjadi perhatian dunia. Aktor yang memiliki perhatian lebih pada sektor perikanan berkempul untuk membahas solusi terbaik yang bisa diterapkan atau sebagai acuan bagi komunitas lain dalam pengelolaan perikanan. Acuan yang telah ditetapkan belum mampu mengatasi keseluruhan permasalahan yang ada. Sehingga mulai beralih pada skema sukarela dan instrumen berbasis pasar, yang

termasuk label berkelanjutan dan sistem sertifikasi (Ponte, 2012). Program ini menandakan terjadi proses penilaian atas produksi sebuah produk yang nantinya memberikan informasi bahwa produk telah mematuhi standar yang telah ditentukan. Demi mengatasi permasalahan pada sektor perikanan, MSC sebagai NGO juga mengadaptasi skema sertifikasi berbasis sukarela, dalam upayanya untuk melindungi laut dari dampak yang ditimbulkan oleh proses penangkapan ikan dan suplai makanan ikan demi masa depan.

Dalam proses sertifikasi MSC tidak terlibat langsung, namun terdapat tim auditor dengan keahlian khusus dalam manajemen perikanan yang bersifat independen. Sebagai cerminan pemahaman terkini mengenai manajemen perikanan standar perikanan MSC (*MSC Fisheries Standard*) telah diterima secara internasional. Pertama, stok makanan laut berkelanjutan. Kedua, meminimalkan dampak negatif terhadap kehidupan laut. Ketiga, manajemen yang efektif dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Harapan yang muncul dari proses sertifikasi melalui prinsip-prinsip ini adalah meningkatkan keuntungan pada sektor lain, serta peningkatan keterlibatannya konsumen yang berkolaborasi dengan MSC Pemerintah guna mengurangi tingkat *bycatch*.

Proses terbentuknya MSC merupakan hasil *workshop* dari WWF dan Unilevers antara tahun 1996 hingga 1997. Pada awal kemunculannya MSC masih diberikan bantuan oleh Unilever sebagai retail terbesar untuk produk olahan laut beku. Hingga 1999, MSC menjadi lebih independen setelah terlepas dari

WWF dan Unilever. Akhirnya pada tahun 2000, MSC mensertifikasi industri perikanan pertama didunia, salah satunya berada di Australia. Program sertifikasi dan label berkelanjutan dari MSC akan meninggalkan tanda bagi industri perikanan bahwa telah menemui praktek yang sesuai standar yang baik. Penilaian ini akan dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Sehingga nanti hasil atau tanda pada industri perikanan akan terlihat kuat, kredibel dan memenuhi pedoman praktek internasional.

Keterlibatan MSC pada isu *bycatch* dalam manajemen perikanan berkelanjutan di australia

Perikanan berkelanjutan ialah kegiatan penangkapan ikan sekaligus melindungi sumber daya perikanan dengan pengetahuan dan prinsip yang sesuai. Namun kegiatan ini akan sulit untuk tercapai karena terhambat oleh permasalahan-permasalahan dalam sektor perikanan, salah satunya adalah *bycatch*. Fenomena yang telah menyumbang kurang lebih 38 juta ton tangkapan yang terbuang atau 40 persen pertahunnya (WWF, 2009), memberikan dampak buruk pada jumlah ikan dilaut, dan spesies lainnya. Permasalahan *bycatch* mengancam spesies endemik di Australia yakni, Australian Sea Lion (Singa Laut Australia). Spesies ini terancam akibat berinteraksi dengan industri perikanan yang penting bagi Australia yaitu, *West Coast Rock Lobster Fishery* (WCRLF). WCRLF merupakan industri penting di Australia yang berorientasi ekspor ke benua Asia, Amerika dan Eropa. Selain itu, industri ini telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Australia Barat. Meski tingkat

pertemuan WCRLF dengan Singa Laut Australia rendah namun ini akan tetap berdampak signifikan pada jumlah populasi. Sehingga kemudian Pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk dapat melindungi spesies Singa Laut Australia. Undang-undang tersebut bernama UU EPBC. Aturan ini mengkategorikan Singa Laut Australia sebagai spesies yang rentan pada tahun 2005.

Namun, upaya ini gagal mengurangi *bycatch* dikarenakan masih ada saja singa laut yang masuk kedalam perangkap lobster. Selain itu sulitnya dalam mengumpulkan data terkait jumlah spesies yang mengalami *bycatch* membuat Pemerintah terhambat dalam mengembangkan metode untuk mengatasi *bycatch*. Pemerintah Australia mulai melakukan penelitian terkait stok perikanan guna melakukan ekspor. UU EPBC sebagai pedoman penelitian dan hasilnya akan dipublikasikan guna mendapat persetujuan untuk melakukan ekspor. Selain itu hasil penelitian ini digunakan untuk mendapatkan sertifikat dari MSC untuk pertama kalinya.

WCRLF mendapat persetujuan untuk melakukan ekspor dan label dari MSC, namun terdapat catatan diantaranya Pertama, peningkatan *Ecological Risk Assessment* (ERA). Muncul kekhawatiran terhadap kemampuan sistem manajemen perikanan dalam mengidentifikasi dampak ekologis dari penangkapan ikan. Hal tersebut disebabkan akibat belum adanya penelitian mengenai dampak ekologis atau ekosistem penangkapan ikan dari WCRLF. Selain itu, pada zona di mana ada efek yang diketahui, terindikasi ada kekurangan proses verifikasi (seperti data

pengamatan pada proses dan hasil penangkapan). Kedua, peningkatan penilaian status stok perikanan WCRLF.

ANALISIS DATA

INFORMASI dan EPISTEMIC

COMMUNITY SEBAGAI POWER MSC

Kemampuan NGO telah dianggap dapat mewakili kepentingannya sendiri layaknya sebuah negara, yang terlibat dalam pertukaran informasi, bernegosiasi, dan memberikan saran kebijakan (Aviel, 2005). Sumber dari peningkatan kemampuan NGO diantaranya adalah pengetahuan, aset keuangan, jumlah pendukung dan peran khusus NGO dalam negosiasi (Betsill et.al, 2008). MSC memiliki kemampuan untuk menstimulasi terjadinya pertukaran informasi antar kelompok kepentingan dan memberikan saran kebijakan dalam manajemen perikanan. Untuk menuju manajemen perikanan berkelanjutan dan mengatasi *bycatch*, Australia membutuhkan MSC sebagai pedoman yang diakui oleh komunitas internasional. Informasi yang mengandung arahan didalam MSC *Principles & Criteria* mendorong Australia membentuk kelompok peneliti yang diharapkan dapat mengumpulkan informasi-informasi penting demi memasuki manajemen perikanan yang berkelanjutan. Partisipasi nyata MSC ialah merubah kebiasaan pembuat kebijakan melalui informasi.

Informasi yang dimiliki MSC berada pada tiga prinsipnya yakni, pertama, stok makanan laut berkelanjutan. Kedua, meminimalkan dampak negatif terhadap kehidupan laut. Ketiga, manajemen yang efektif dan kepatuhan

terhadap peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip ini kemudian mendorong adanya pengumpulan data dan analisis untuk mencapai pengelolaan manajemen perikanan berkelanjutan. Prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi WCRLF untuk menyelesaikan kekurangan ERA sebelumnya. Hasilnya nanti akan melengkapi keterbatasan pemahaman Pemerintah mengenai pengelolaan manajemen perikanan berkelanjutan

Bukti dari stimulus ini adalah, terbentuknya *sea lion scientific reference group* (SL-SRG) oleh Pemerintah Australia. SL-SRG bertanggungjawab dalam mengumpulkan, menganalisis serta memberi saran terkait data-data temuan perihal *bycatch* yang menimpa Singa laut Australia. SL-SRG telah mengasilkan dokumen yang dipublikasikan Mei 2005 yaitu, *Proposed Implementation of Sea Lion Exclusion Devices in the Western Rock Lobster Fishery*. Dokumen tersebut mengandung informasi terperinci mengenai *bycatch* dan kemungkinan langkah mitigasi yang harus diterapkan untuk menghentikan *bycatch*. Informasi ini kemudian digunakan untuk menstimulus konsumen agar lebih peduli dengan dampak praktek penangkapan dari industri perikanan mereka.

Tiga dimensi three faces of power dalam implementasi program sertifikasi msc di Australia

Dimensi Pertama dari Three Faces of Power yang meletakkan dasar pada preferensi suara kelompok dengan hasil kebijakan tengah terjadi. Fenomena ini memungkinkan underdog (NGO) yang dalam penelitian ini adalah MSC memiliki ruang yang cukup demi mendorong revisi dalam evaluasi kebijakan terhadap

bycatch dalam rantai pengelolaan manajemen perikanan di Australia. Melalui penjelasan diatas terkait kutipan Kappen (1995) yang digunakan peneliti mengenai NGO yang memfokuskan diri untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, MSC berhasil mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait perikanan berkelanjutan yang kemudian menghasilkan arahan berdasarkan nilai-nilai yang telah disepakati secara internasional.

MSC berusaha untuk menciptakan atau memperkuat nilai-nilai terkait manajemen industri perikanan yang berkelanjutan. Nilai-nilai yang telah ada dalam *Blue Label* yang berasal dari *Principle & Criteria*, membatasi ruang lingkup dan membuat masyarakat dan pemerintah untuk bisa saling mempengaruhi. Proses pengambilan kebijakan demi kepentingan publik dengan melibatkan aktor lebih banyak dari sebelumnya, merupakan bentuk agenda setting yang dilakukan MSC. Kampanye MSC terkait manajemen industri perikanan yang berkelanjutan telah mempengaruhi pengambilan keputusan melalui nilai-nilai publik. Kampanye yang dimaksud ialah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha yang dilakukan peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir guna mencapai suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, memengaruhi, menghambat, membelokan pencapaian itu sendiri. Fenomena ini telah membuktikan Dimensi Kedua *Three Faces of Power* yang sedang berjalan dengan pertimbangan beberapa aktor bukan negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Dimensi Ketiga dari *Three Faces of Power* yakni memanipulasi aktor dengan tujuan membalikkan pemikiran aktor tersebut dengan menciptakan kondisi tertentu. Kondisi dimana aktor lain telah merencanakan dan memberlakukan solusi untuk isu yang tengah dihadapi, dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman terhadap isu yang tengah dihadapi. MSC telah menunjukkan bahwa *Blue Label* dengan berdasarkan *Principle & Criteria* telah memanipulasi Australia dan konsumen di Australia untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan manajemen industri perikanan. Informasi penting terkait manajemen industri perikanan yang berkelanjutan mampu memancing konsumen untuk memilih produk berlabel apa yang akan dibelinya. Serta memberikan saran maupun kritik kepada Pemerintah untuk membuat kebijakan sesuai dengan keinginan konsumen yang telah tereduksi oleh MSC. Kebijakan diharapkan dapat mengatasi permasalahan bycatch yang menimpa Singa Laut Australia. Kebijakan tersebut adalah SLED sebagai wujud fisik stimulasi pengetahuan dan informasi yang disebarluarkan oleh MSC.

Mengutip kembali yang disampaikan Finnemore, et.al (1998) terkait tahapan untuk menghasilkan norma baru. Pada poin ketiga yang menyatakan bahwa setelah publik menginternalisasi norma baru, pemerintah harus mengakui bahwa norma baru ada di antara warganya. Internalisasi merupakan penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku (kbbi.web.id, 2020). Proses yang dijalani oleh

publik dalam menerima norma baru yang berasal dari NGO merupakan bukti bahwa NGO memiliki power dalam membentuk pemikirin aktor lain. Ketika norma tersebut telah tertanam secara sosial dalam kehidupan aktor yang beridentitas sosial dan minatnya mendorong aktor tersebut untuk mengenali sebagai sumber power, maka disanalah otoritas moral memperoleh kegunaan sebagai sumber power (Hall, 1997). Ketika proses penerimaan ini berhasil pada publik, komunitas, atau masyarakat maka pemerintah dapat ditekan dengan menggunakan masa yang lebih banyak guna membentuk kebijakan yang sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Kondisi ini menandakan bahwa NGO berhasil dan memiliki bukti akan power yang dimilikinya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa MSC memiliki kapabilitas dalam mewujudkan program SLED sebagai kebijakan dalam mengatasi permasalahan *bycatch*. MSC memiliki informasi yang tidak dimiliki Australia untuk mengatasi *bycatch* yang menimpa Singa Laut Australia. *Blue Label* membantu Australia mendorong konsumen ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dengan mengarahkan keinginan konsumen saat membeli produk berlabel berkelanjutan. Selain itu, kelompok peneliti memiliki peran dalam menguatkan informasi yang telah ada sebelumnya. Melalui hasil pengumpulan dan analisis data yang ada dan semakin kuat. Sehingga negara harus mengakui telah membentuk nilai baru pada

konsumennya. Ketika banyak aktor yang mulai terlibat dalam mengatasi *bycatch* dan hal ini akibat dari stimulus pengetahuan dari MSC. Menandakan MSC telah membuktikan bahwa terdapat *power* yang berasal dari aktor bukan negara. Aktor bukan negara yang semula dianggap tak setara dengan negara terbukti memiliki tingkat yang hampir sama dengan negara pada isu tertentu, dan mampu mendorong terjadinya proses pembuatan kebijakan baru atas dasar informasi dan kelompok peneliti sebagai sumber *power*. Nilai yang dimiliki MSC telah membentuk pemikiran dan perilaku dari kelompok-kelompok ini, yang pada akhirnya bersama-sama berkeinginan mencapai manajemen perikanan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Website

- Australiascoralcoast.com. (2018). Australian Sea Lion Encounters. Diakses pada tanggal 13 Desember 2018, [<https://www.australiascoralcoast.com/see-do/australian-sea-lion-encounters>]
- Department of the Environment and Energy. (2019). Seals and sea lions. Diakses pada tanggal 06 Mei 2019, [<http://www.environment.gov.au/marine/marine-species/seals-and-sea-lions>]
- Department of Primary Industries and Regional Development. (2019). West Coast Rock Lobster Fishery. Diakses pada tanggal 14 Mei 2019, [<http://www.fish.wa.gov.au/Fishing-and-Aquaculture/Commercial-Fishing/Commercial-Fishing-Management/Pages/West-Coast-Rock-Lobster-Fishery.aspx>]
- Government of Western Australia, 2017. Australian Sea Lion. Diakses pada tanggal 16 Juni 2019, [<https://www.dpaw.wa.gov.au/management/marine/marine-parks-wa/facts/400-australian-sea-lion>]

kbbi.web.id. (2020). Internalisasi. Diakses pada tanggal 07 Januari 2020, [https://kbbi.web.id/internalisasi]

Lorenzi, M. (2006), 'Power: A Radical View by Steven Lukes', *Crossroads*, 6, 87– 95. Diakses pada tanggal 16 Juni 2019, [https://cpb-eu-w2.wpmucdn.com/caledonianblogs.net/dist/2/77/files/2009/12/Lorenzi-Reading.pdf]

World Wildlife Fund. (2006). Species fact sheet: Bycatch. Diakses pada tanggal 05 Mei 2019, [http://awsassets.panda.org/downloads/bycatch__apr_2006.pdf]

World Wildlife Fund. (2009). Forty percent of global fisheries catch wasted or unmanaged – WWF. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2019, [https://wwf.panda.org/?162142/Forty]

Buku

Nye Jr., Joseph. (1990). *Soft Power*. Foreign Policy, (80), 153

Lukes, Steve. (2005). *Power a Radical View Second Edition*. British Sociological Association.

Risse-Kappen, Thomas. (1995). *Bringing Transnational Relations Back in: non-state actors, Domestic structures, and International Institutions*. United Kingdom: Cambridge University Press

Jurnal/Dokumen/Karya Ilmiah

Aviel, J. F. 2005. NGOs and international affairs. In *Multilateral Diplomacy and the United Nations Today*, 2nd ed., edited by J. P. Muldoon Jr., J. F. Aviel, R. Reitano, and E. Sullivan. Boulder, CO: Westview Press, pp. 159–72.

Betsill, Michele M & Corell, Elisabeth. (2008). *NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*. London, The MIT Press.

Campbell, Dr. Richard. (2005). Report for The Sea Lion Scientific Reference Group. Fisheries Occasional Paper No. 16, 02-24

Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink. 1998. "International norm dynamics and political change." *International Organization* 52:887-917.

Rodney Bruce Hall. (1997). *International Organization*. MIT Press. Vol. 51, No. 4, pp. 591-622.

Ponte, S. (2012), "The Marine Stewardship Council (MSC) and the Making of a Market for 'Sustainable Fish'", *Journal of Agrarian Change*, Vol. 12, No. 2-3, pp. 300-315.